

DAMPAK PENDAPATAN DAERAH, PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PENDUDUK MISKIN PADA KAWASAN PURWOMANGGUNG JAWA TENGAH

ABSTRAK

Fenomena kemiskinan sudah lama terjadi. PBB mencanangkan pemberantasan kemiskinan dan kelaparan tahun 2001 dan Indonesia sudah melakukan langkah-langkah dengan membentuk Team Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK) tahun 2010. Kabupaten dan Kota Jawa Tengah juga telah melakukan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan, tapi belum terkoordinasi dengan baik. Dalam penelitian ini dianalisis usaha-usaha yang telah dilakukan terhadap penduduk miskin (*Y*) dengan melihat variabel Pendapatan Daerah (*X1*), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (*X2*) dan Indeks Pembangunan Manusia (*X3*). Hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan hasil $Y = 200,702 - 2,947 X_1 - 3,175 X_2 - 2,437 X_3$

Kata kunci: Penduduk Miskin, PAD, PNPM, IPM

Martani

Fakultas Ekonomi
Universitas Gunadarma

martani@staff.gunadarma.ac.id

PENDAHULUAN

Kemiskinan di dunia telah berlangsung sejak dulu. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangnya, namun sampai saat ini masih terdapat lebih dari 1,2 milyar penduduk dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari satu dolar per hari. Terlebih bagi Indonesia, sebagai sebuah negara berkembang, masalah kemiskinan menjadi permasalahan yang sangat penting dan pokok. Secara khusus di daerah perkotaan dan pedesaan, kemiskinan dan pengangguran menjadi permasalahan yang sangat krusial dan sulit untuk ditanggulangi.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sampai Maret 2012, tingkat kemiskinan telah turun menjadi 11,96% (29,13 juta jiwa). Sebelumnya, sampai dengan Maret 2011, tingkat kemiskinan nasional menurun hingga 12,49%, dari 13,33% pada tahun 2010. Selanjutnya, pada periode September 2011, tingkat kemiskinan menurun lagi menjadi 12,36%. Data tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia sangat memprihatinkan meskipun dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan.

Dalam rangka usaha tersebut pemerintah telah merancang pembangunan yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerah/kota dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan usaha-usaha lain.

Pertumbuhan ekonomi di sisi lain tidak mengentaskan kemiskinan. Tingkat pengangguran di Nigeria selama 30 tahun, misalnya, memperburuk masalah itu. Untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran diperlukan kondisi yang strategis, disertai dengan kebijakan yang disengaja. Pola pertumbuhan di Nigeria perlu diubah sehingga masyarakat miskin di daerah pedesaan dan perkotaan dapat berpartisipasi dalam proses tersebut (Osinubi, 2005).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain diharapkan dapat meningkatkan belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, sehingga menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004).

Penggunaan DAK diatur oleh pemerintah pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal. Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik.

DAU, DAK, PAD dan PDRB berpengaruh terhadap belanja modal

pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa manajemen pengeluaran pemerintah daerah, khususnya dalam hal alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia sangat tergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat (Tuasikal, Askam, 2008)

Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal karena Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya dari pada untuk membiayai Belanja Modal seperti terlihat pada lampiran Anggaran Belanja (Putro, Nugroho, dan Pamudji, 2009)

Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap pendapatan per kapita, tetapi pertumbuhan yang terjadi masih kurang merata sehingga masih terdapat banyak ketimpangan/jarak ekonomi antar daerah (Harianto, dan Adi, 2007)

Penelitian dari Budi Santoso (2013) terhadap kemiskinan di 33 propinsi menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh terhadap penurunan jumlah kemiskinan daerah, berbeda halnya dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan daerah. Dari analisis antar variabel secara tidak langsung terdapat pengaruh PAD, DAU, DAK maupun DBH terhadap penurunan pengangguran maupun kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dampak peningkatan subsidi (DAU dan DAK) pada kemiskinan menunjukkan penurunan yang signifikan, khususnya area pedesaan. Kebijakan transfer pendapatan menurunkan angka kemiskinan secara langsung khususnya di daerah pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari seluruh indikator kemiskinan seperti *head count index*, *poverty depth* dan *poverty severity* yang telah meningkat, terkecuali rumah tangga perkotaan (Maipita, Indra, 2010).

Berdasarkan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), IPM kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 berkisar antara 68,20 (Kabupaten Brebes) sampai 77,86 (Kota Surakarta). Pada tahun 2011 IPM daerah mengalami peningkatan. Data BPS 2011 menunjukkan peringkat pertama sebesar 77,86 (kota Surakarta) peringkat kedua kota Semarang (77,11) peringkat ketiga kota Magelang (76,66) peringkat keempat kota Salatiga (76,53) dan kelima kota Pekalongan (74,47).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap jumlah alokasi belanja modal dengan arah hubungan yang bersifat negatif, yang bermakna jika indeks pembangunan manusia satu kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat sudah tinggi maka jumlah alokasi belanja modal menjadi rendah (Andaiyani, 2012). Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai tanda negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Tengah. (Whisnu, Saputra dan Bagio, Mudakir, 2011).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2008. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia akan berakibat pada meningkatnya produktivitas kerja penduduk, sehingga akan meningkatkan perolehan pendapatan. Hal ini berarti juga semakin tinggi perolehan pendapatan akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin. Hasil regresi ini ditunjang dengan data bahwa adanya kecenderungan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2008 pada sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah diiringi dengan penurunan jumlah penduduk miskin di beberapa kabupaten/kota di provinsi itu (Sukmaraga, Prima dan Hayati, Banatul, 2011).

PNPM-MP diharapkan akan mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja secara berkelanjutan. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dibutuhkan sosialisasi serta pemahaman yang kuat di masyarakat, bahwa program pemberdayaan bersifat sementara. Diharapkan PNPM-MP ke depan menjadikan masyarakat kota Tasikmalaya semakin mandiri, dalam arti masyarakat memiliki kecukupan pangan, sandang, mulai bisa membuat rumah sederhana, bisa menyekolahkan putra-putrinya secara lebih baik tanpa kendala biaya, bisa berobat tanpa harus dipungut biaya tinggi dan gratis bagi yang miskin, mendapatkan keamanan dan ketentraman serta lingkungan yang baik (Nafiana dkk, 2011).

Mengadopsi "Teori Laron" (laron akan berbondong-bondong berkumpul menuju cahaya di tengah kegelapan), hal ini ibarat menciptakan cahaya, yang akan mendorong dan menciptakan daya tarik yang dapat mengerakan minat masyarakat dan pelaku usaha untuk berbondong-bondong ke wilayah tersebut. Berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2003, Propinsi

Jawa Tengah telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRW) yang berdasar UU Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Dalam Peraturan Daerah tersebut yang dimaksud dengan kawasan strategis, adalah kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan sendiri dan kawasan di sekitarnya. Apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Jawa Tengah dalam perencanaan pembangunan itu mengadopsi "Teori Laron".

Adapun yang termasuk kawasan strategis berdasarkan Peraturan Daerah No 21 Tahun 2003 pasal 28 adalah kawasan Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen), Purwomanggung (Purworejo, Wonosobo, Magelang dan Temanggung), Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten), Banglor (Rembang dan Blora), Wanarakuti (Juwana, Jepara, Kudus dan Pati), Kedungsapur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi), Tangkallangka (Batang, Pekalongan, Pemalang dan Kajen), dan Bregas (Brebes, Tegal dan Slawi).

Menurut Warsono, Hardi (2009) di antara delapan kawasan strategis tersebut terdapat tiga kawasan yang sudah memiliki pendampingan dari Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), yaitu Barlingmascakeb, Kedungsepur dan Subosukowonosraten. Ketiga kawasan tersebut sudah memiliki visi dan misi sehingga program kerjasama sama strategis tersebut sudah berjalan baik dan terencana. Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti kawasan Purwomanggung karena kawasan tersebut belum memiliki pendamping dan memiliki jumlah penduduk terbanyak di antara 3.484.000 jiwa tahun 2011, terbanyak di

antara kasawan yang tidak memiliki pendampingan. Data diambil selama kurun waktu lima tahun sejak Perda tersebut dicanangkan dengan melihat Pendapatan Daerah, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia, dan Penduduk Miskin di kawasan Purwomanggung.

METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis topik ini peneliti menggunakan teori yang dipelopori oleh Francois Perroux yang dikenal dengan Teori Pusat Pertumbuhan (*Growth Pole*).

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi APBD, Badan Pusat Statistik (BPS) daerah dan dari berbagai sumber baik yang diambil secara langsung maupun dipublikasikan melalui berbagai tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang juga merupakan data antar ruang (*cross section*) dan data runtun waktu (*time series*), yaitu data secara kronologis disusun menurut waktu dari tahun 2007 hingga tahun 2011.

Dalam penelitian ini objek yang dipilih adalah kawasan Purwomanggung dengan alasan yang sudah disebutkan di atas yakni karena kawasan ini belum memiliki pendampingan seperti kawasan Barlingmascakeb, Kedungsepur dan Subosukowonosraten. Kawasan Purwomanggung memiliki jumlah penduduk yang terbanyak dibandingkan dengan kawasan lagi yang belum memiliki pendampingan. Tabel 1 menampilkan jumlah penduduk pada tiap kawasan.

Tabel 2 menampilkan informasi awal yang berhubungan dengan kabupaten/kota pada kawasan Purwomanggung yang menjadi bahan penelitian lebih lanjut.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Pada Beberapa Kawasan Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk
1	Purwomanggung (Purworejo, Wonosobo, Magelang dan Temanggung)	3.484.000
2	Tangkalangka (Batang, Pekalongan, Pemalang dan Kajen)	3.108.361
3	Banglor (Rembang dan Blora)	1.430.587
4	Bregas (Brebes, Tegal dan Slawi)	3.383.094
5	Wanarakuti (Juwana, Jepara, Kudus dan Pati)	3.102.887

Sumber : Data diolah dari hasil survey BPS tahun 2011

Tabel 2.
Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja Pada Kawasan Purwomangun Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah (dln.ribuan)	PDRB atas Harga Berlaku (dln.jutaan)	Jumlah Penduduk	Angkatan Kerja 15-64
1	Kab. Purworejo	77.111.203	7.143.081,12	696.141	451.121
2	Kab. Wonosobo	67.397.977	4.323.254,88	758.993	498.366
3	Kab. Magelang	90.462.631	8.770.808,70	1.194.353	800.158
4	Kab. Temanggung	63.328.489	5.603.983,71	715.907	486.479
5	Kota Magelang	63.557.702	2.323.478,16	118.606	83.581

Sumber : Data diolah dari hasil survei BPS Tahun 2011

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang didapat maka peneliti mencoba membahas dan menganalisis dengan menggunakan alat bantu SPSS dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.
Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
	IPM, PAD, PNPM ^a	.	Enter

- a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: miskin

Tabel Variables Entered Removed menunjukkan metode yang digunakan, yang dipilih adalah Enter. Metode ini menentukan bagaimana semua variabel independen (IPM, PAD dan PNPM) dimasukkan untuk dianalisa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan yang dipaparkan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Semua variabel yang digunakan (PAD, IPM dan PNPM) menunjukkan hasil dari F hitung dan nilai Sign 0,000 yang berarti hubungan antar variabel linier.
2. Dari hasil tabel 5 diperoleh persamaan $Y = 200,702 - 2,947 X_1 - 3,175 X_2 - 2,437 X_3$ yang berarti penambahan PAD 1 juta rupiah akan mengurangi 2,947 penduduk miskin; penambahan 1 poin IPM akan mengurangi 3,175 penduduk miskin; penambahan 1 juta rupiah dana PNPM akan mengurangi 2,437 penduduk miskin.
3. Pada model Summary dihasilkan $R = 0,899$ hubungan antar variabel sangat mempengaruhi dan nilai R Square = 0,808 dan sisanya 0,192 dipengaruhi dari variabel lain.

Tabel 4.
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	528.951	3	176.317	22.390	.000 ^a
Residual	125.999	16	7.875		
Total	654.950	19			

- a. Predictors: (Constant), IPM, PAD, PNPM
b. Dependent Variable: MISKIN

Tabel ANOVA memaparkan uji kelinearan antara variabel yang digunakan dapat melihat hasil F hitung dibandingkan dengan F tabel atau melakukan perbandingan nilai Sign dengan $\alpha 0,005$.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 2007. *Dukungan Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemberantasan Kemiskinan*.

Tabel 5.
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	200.702	36.891		5.440	.000
PAD	-9.749E-8	.000	-.236	-2.149	.047
PNPM	-3.175E-5	.000	-.086	-.472	.644
IPM	-2.437	.486	-.918	-5.010	.000

- a. Dependent Variable: MISKIN

Tabel Coefficient memaparkan nilai konstanta a dan b persamaan linier $Y = 200,702 - 9,749 X_1 - 3,175 X_2 - 2,437 X_3$. Hasil dari tabel koefisien bisa dilihat pada hasil t hitung masing-masing variabel selain itu dapat melakukan perbandingan hasil nilai Sig masing-masing dibandingkan dengan $\alpha 0,005$

BPS (berbagai edisi). *Jateng Dalam Angka*. Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah

Hermanto S.; Dwi W. 2006. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Penduduk Miskin di Indonesia: Proses Pemerataan dan*

Tabel 6.
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	.899 ^a	.808	.772	2.80624	2.630

- a. Predictors: (Constant), IPM, AD, PNPM
b. Dependent Variable: Miskin

Tabel Model Summary menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) yang memperlihatkan tingkat hubungan antar variabel yang hasilnya 0,899. Sedangkan R Square atau koefisien determinasi menunjukkan hasil 0,808.

Kemiskinan. Pusat Kajian Ekonomi, Institusi Pertanian Bogor.

Maipita, Indra dkk. 2010. "Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi dan Angka Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Moneter*

dan Perbankan, 2010,

Nafiana dkk. 2011. "Pengaruh Pinjaman Bergulir Program Nasional, Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Terhadap Konsumsi Rumah Tangga di Kota Tasikmalaya". *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran*

Peraturan daerah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2003

Osinubi, Tokunbo, Simbowale. 2005. "Macroemetric Analysis of Growth, Unemployment and Poverty in Nigeria". *Pakistan Economic and Social Review*, Volume XLIII, No. 2 (Winter 2005), pp. 249-269

Sandhika, Ardyan, Wahyu,. Dan Hendarto, Mulyo, 2012, "Analisa Pengaruh Aglomerasi, Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk dan Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal", *Diponegoro Journal of Economics*, Volume 1, No 1, 2012, hal 1-6.

Santoso, Budi. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan Pengangguran dan Kemiskinan." *Jurnal keuangan dan Bisnis Vol 5 No.2 Juli 2013*

Suratno Putro, Nugroho. 2006. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kaus Pada Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah)". *Jurnal Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang*

Tuasikal, Askam. 2008. "Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia". *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol 1 No.2 Hal 142-155

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wahyu S., Ardiyan dan Hendarto, Mulyo. 2012. "Analisis Pengaruh Aglomerasi, Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk, Dan Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal." *Journal of Economic*, Universitas Diponogoro, Vol 1.No. 1, 2012

Warsono, Hardi. 2009. *Regionalisasi dan Manajemen Kerjasama Antar Daerah* (Study Kasus Dinamika Kerjasama Antar Daerah yang Berdekatan di Jawa Tengah). Disertasi, 2009.